LAPORAN HASIL PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI DI PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG SESUAI PERMENPANRB NOMOR 25 TAHUN 2021



I. PENDAHULUAN

Penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah merupakan amanat dari kebijakan nasional dalam rangka mewujudkan birokrasi yang lebih lincah, efektif, dan efisien. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia tentang penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional, serta penataan organisasi perangkat daerah agar lebih ramping dan berorientasi pada kinerja pelayanan publik. Kebijakan penyederhanaan birokrasi ini kemudian dilanjutkan dalam Peraturan Menteri PANRB yang mengatur penyederhanaan birokrasi antara lain PermenPANRB No. 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, PermenPANRB No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, dan PermenPANRB No. 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Badung telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perangkat daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, serta Kecamatan, dengan fungsi mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pelayanan publik.

Tujuan penyederhanaan struktur organisasi di Kabupaten Badung adalah:

- 1. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang proporsional, efektif, dan efisien.
- 2. Menyederhanakan rantai birokrasi untuk mempercepat proses pengambilan keputusan.
- 3. Mengalihkan jabatan administrasi tertentu ke jabatan fungsional sesuai bidang keahlian.
- 4. Meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui tata kelola yang lebih sederhana.

II. PROSES PENYEDERHANAAN

Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi dengan tahapan sebagai berikut:

1. Inventarisasi Jabatan Struktural, Analisis dan Pemetaan Jabatan

- Melakukan pemetaan terhadap seluruh jabatan eselon III dan IV di perangkat daerah.
- o Identifikasi jabatan yang memiliki fungsi teknis, administratif, dan koordinatif.
- o Jabatan administrasi yang bersifat teknis dialihkan menjadi jabatan fungsional.
- o Jabatan administrasi yang bersifat koordinatif tetap dipertahankan.
- Mengajukan permohonan Rekomendasi Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung kepada Gubernur Bali sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

2. Penetapan Melalui Peraturan Bupati

Setelah mendapat Rekomendasi Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dari Gubernur Bali sebagai Wakil Pemerintah Pusat, maka dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan struktur organisasi perangkat daerah. Sehubungan dengan hal ini Pemerintah Kabupaten Badung telah menindaklanjuti seluruh rangkaian penyederhanaan struktur organisasi dengan capaian 100%. Pemerintah Kabupaten Badung juga telah menetapkan Peraturan Bupati Badung nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Badung nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai perwujudan SOTK pasca penyederhanaan birokrasi.

3. Pelantikan dan Penyesuaian Jabatan

- Pegawai yang terdampak penyederhanaan dialihkan menjadi pejabat fungsional sesuai kompetensi.
- o Penetapan tunjangan dan pola karier disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.

III. HASIL PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Pengurangan Jabatan Struktural

- Sebagian besar jabatan eselon IV (Kepala Seksi/Subbagian) dihapuskan dan dialihkan menjadi jabatan fungsional.
- o Jumlah jabatan struktural eselon III tertentu juga mengalami penyetaraan jabatan.

2. Struktur Organisasi Lebih Ramping

- Perubahan nomenklatur di beberapa Perangkat Daerah, yaitu dari Perbup 33
 Tahun 2021 menjadi Perbup 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perbup 33
 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
 Tata Kerja Perangkat Daerah.
- o Penyatuan fungsi administrasi pada unit kerja tertentu.
- Penguatan jabatan fungsional sebagai ujung tombak pelayanan publik.

TABEL HASIL PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI

| N o. | Jahatan Caayai Dawkada | Rekomendas | i Gubernur | Keteran |
|---------|--|--|--------------------------------|---------|
| | Jabatan Sesuai Perkada | Jabatan Yang Dipertahankan | Jabatan Yang Disederhanakan | gan |
| SEK | (RETARIATDAERAH | | | |
| 1 | Sekretaris Daerah | Sekretaris Daerah | | |
| 2 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat . | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat . | | |

| 3 | Kepala Bagian Tata Pemerintahan . | Kepala Bagian Tata Pemerintahan . | | |
|----|--|---|---|--|
| 4 | Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan. | | Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan. | |
| 5 | Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan. | | Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan | |
| 6 | Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah. | | Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah. | |
| 7 | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat . | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat . | | |
| 8 | Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual. | | Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual. | |
| 9 | Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial. | | Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial. | |
| 10 | Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat. | | Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat. | |
| 11 | Kepala Bagian Hukum . | Kepala Bagian Hukum . | | |
| 12 | Kepala Sub Bagian Perundangundangan. | | Kepala Sub Bagian Perundangundangan. | |
| 13 | Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum. | | Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum. | |
| 14 | Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi. | | Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi. | |
| 15 | Kepala Bagian Kerja Sama . | Kepala Bagian Kerja Sama | | |
| 16 | Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri. | | Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri. | |
| 17 | Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri. | | Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri. | |
| 18 | Kepala Sub Bagian Evaluasi Kerja Sama. | | Kepala Sub Bagian Evaluasi Kerja Sama. | |
| 19 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan . | Asisten Perekonomian dan Pembangunan . | | |

| 20 | Kepala Bagian Perekonomian . | Kepala Bagian Perekonomian . | | |
|----|---|--|--|--|
| 21 | Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD. | | Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD. | |
| 22 | Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian. | | Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian. | |
| 23 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil. | | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil. | |
| 24 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan . | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan . | | |
| 25 | Kepala Sub Bagian Penyusunan Program. | | Kepala Sub Bagian Penyusunan Program. | |
| 26 | Kepala Sub Bagian Pengendalian Program. | | Kepala Sub Bagian Pengendalian Program. | |
| 27 | Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. | | Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. | |
| 28 | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa . | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa . | | |
| 29 | Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. | | Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. | |
| 30 | Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. | | Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. | |
| 31 | Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. | | Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. | |
| 32 | Kepala Bagian Sumber Daya Alam . | Kepala Bagian Sumber Daya Alam . | | |

| 33 | Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan. | | Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan. | |
|----|---|--|--|--|
| 34 | Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup. | | Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup. | |
| 35 | Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air. | | Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air. | |
| 36 | Asisten Administrasi Umum . | Asisten Administrasi Umum . | | |
| 37 | Kepala Bagian Umum . | Kepala Bagian Umum . | | |
| 38 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | | |
| 39 | Kepala Sub Bagian Perlengkapan. | | Kepala Sub Bagian Perlengkapan | |
| 40 | Kepala Sub Bagian Rumah Tangga. | | Kepala Sub Bagian Rumah Tangga | |
| 41 | Kepala Bagian Organisasi | Kepala Bagian Organisasi | | |
| 42 | Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan. | | Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan. | |
| 43 | Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana. | | Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana. | |
| 44 | Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi. | | Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi. | |
| 45 | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan . | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | |
| 46 | Kepala Sub Bagian Protokol. | Kepala Sub Bagian Protokol. | | |
| 47 | Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan. | | Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan. | |

| 48 | Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan. | | Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan. |
|-----|--|--|---|
| 49 | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan . | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan . | |
| 50 | Kepala Sub Bagian Perencanaan. | | Kepala Sub Bagian Perencanaan. |
| 51 | Kepala Sub Bagian Keuangan. | | Kepala Sub Bagian Keuangan |
| 52 | Kepala Sub Bagian Pelaporan. | | Kepala Sub Bagian Pelaporan. |
| SEK | RETARIAT DPRD | | |
| 1 | Sekretaris DPRD | Sekretaris DPRD | |
| 2 | Kepala Bagian Umum dan Keuangan | Kepala Bagian Umum dan Keuangan | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian | |
| 4 | Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan | | Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan |
| 5 | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan | | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan * |
| 6 | Kepala Bagian Hukum dan Risalah | Kepala Bagian Hukum dan Risalah | |
| 7 | Kepala Sub Bagian Kajian Perundangundangan | | Kepala Sub Bagian Kajian Perundangundangan |
| 8 | Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah | | Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah |
| 9 | Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi | | Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi |
| 10 | Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran | Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran | |

| 11 | Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan | | Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan |
|-----|--|---|---|
| 12 | Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran | | Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran |
| 13 | Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama dan Aspirasi | | Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama dan Aspirasi |
| INS | PEKTORAT | | |
| 1 | Inspektur | Inspektur | |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Perencanaan | | Kepala Sub Bagian Perencanaan |
| 4 | Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi | | Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi |
| 5 | Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan | Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan | |
| 6 | Inspektur Pembantu I | Inspektur Pembantu I | |
| 7 | Inspektur Pembantu II | Inspektur Pembantu II | |
| 8 | Inspektur Pembantu III | Inspektur Pembantu III | |
| 9 | Inspektur Pembantu IV | Inspektur Pembantu IV | |
| 10 | Inspektur Pembantu V | Inspektur Pembantu V | |
| DIN | AS PARIWISATA | | |
| 1 | Kepala Dinas | Kepala Dinas | |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | |
| 4 | Kepala Sub Bagian Keuangan | | Kepala Sub Bagian Kepegawaian |
| 5 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. |
| 6 | Kepala Bidang Industri Pariwisata | Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | |
| 7 | Kepala Seksi Akomodasi dan MICE | | Kepala Seksi Usaha Pariwisata |

| 8 | Kepala Seksi Rumah Makan, Bar dan Restauran | | Kepala Seksi Ekonomi Kreatif |
|----|--|--|---|
| 9 | Kepala Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum | | Kepala Seksi Standar dan Sertifikasi Usaha. |
| 10 | Kepala Bidang Daya Tarik Wisata | Kepala Bidang Destinasi Pariwisata | |
| 11 | Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata | | Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata |
| 12 | Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata | | Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata |
| 13 | Kepala Seksi Pengembangan Wisata Minat Khusus | | Kepala Seksi Pengembangan Pengembangan Daya Tarik Wisata. |
| 14 | Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata | Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata | |
| 15 | Kepala Seksi Analisa Pasar Pariwisata | | Kepala Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata |
| 16 | Kepala Seksi Promosi Pariwisata dan | | Kepala Seksi Promosi Pariwisata |
| 17 | Kepala Seksi Informasi Pariwisata | | Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Digital. |
| 18 | Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | |
| 19 | Kepala Seksi Bimbingan Wisata | | Kepala Seksi Bimbingan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata |
| 20 | Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata |
| 21 | Kepala Seksi Bimbingan Kelembagaan Pariwisata | | Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif. |

| DIN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN | | | |
|-----|---|--|---|--|
| 1 | Kepala Dinas | Kepala Dinas | | |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris | | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | | |
| 4 | Kepala Sub Bagian Keuangan | Kepala Sub Bagian Keuangan | | |
| 5 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. | |
| 6 | Kepala Bidang Tata Lingkungan | Kepala Bidang Tata Lingkungan | | |
| 7 | Kepala Seksi Inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | | Kepala Seksi Inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | |
| 8 | Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan | | Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan | |
| 9 | Kepala Seksi Penataan Pertamanan dan Lingkungan Hidup | | Kepala Seksi Penataan Pertamanan dan Lingkungan Hidup. | |
| 10 | Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | | |
| 11 | Kepala Seksi Pengurangan Sampah | | Kepala Seksi Pengurangan Sampah | |
| 12 | Kepala Seksi Penanganan Sampah | | Kepala Seksi Penanganan Sampah | |
| 13 | Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | | Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. | |

| 14 | Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | | |
|-----|---|--|--|--|
| 15 | Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan | | Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan | |
| 16 | Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan | | Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan | |
| 17 | Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan | | Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan. | |
| 18 | Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | | |
| 19 | Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan | | Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan | |
| 20 | Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan | | Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan | |
| 21 | Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | | Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. | |
| DIN | AS KEBUDAYAAN | | | |
| 1 | Kepala Dinas | Kepala Dinas | | |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris | | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | | |
| 4 | Kepala Sub Bagian Keuangan | | Kepala Sub Bagian Kepegawaian | |
| 5 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. | |
| 6 | Kepala Bidang Adat dan Tradisi | Kepala Bidang Pengembangan | | |

| | | Kebudayaan | | |
|----|--|-------------------------------|--|--|
| 7 | Kepala Seksi Adat | | Kepala Seksi Pengelolaaan Kebudayaan Dan Adat | |
| 8 | Kepala Seksi Lembaga Adat | | Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Adat | |
| 9 | Kepala Seksi Pelestarian Tradisi | | Kepala Seksi Pemajuan Kebudayaan. | |
| 10 | Kepala Bidang Kesenian | Kepala Bidang Kesenian | | |
| 11 | Kepala Seksi Pelestarian dan Pengembangan Seni | | Kepala Seksi Pembinaan Kesenian | |
| 12 | Kepala Seksi Perlindungan dan Perizinan Seni | | Kepala Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Kesenian | |
| 13 | Kepala Seksi Pementasan dan Penghargaan Seni | | Kepala Seksi Pengelolaan Lembaga Kesenian. | |
| 14 | Kepala Bidang Sejarah dan Cagar Budaya | Kepala Bidang Cagar Budaya | | |
| 15 | Kepala Seksi Sejarah | | Kepala Seksi Penetapan Cagar Budaya | |
| 16 | Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya | | Kepala Seksi Pengelolaan Cagar Budaya | |
| 17 | Kepala Seksi Registrasi dan Penetapan Cagar Budaya | | Kepala Seksi Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Cagar Budaya. | |
| 18 | Kepala Bidang Dokumentasi Kebudayaan | Kepala Bidang Sejarah | | |
| 19 | Kepala Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan Dokumentasi Kebudayaan | | Kepala Seksi Pembinaan Sejarah | |

| 20 | Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kebudayaan | | Kepala Seksi Penyediaan Sarana Prasarana Sejarah |
|-----|--|--|--|
| 21 | Kepala Seksi Pengembangan Sastra dan Kepustakaan | | Kepala Seksi Data dan Informasi. |
| DIN | AS PENANAMAN MODAL PELAY | ANAN TERPADU SATU | |
| 1 | Kepala Dinas | Kepala Dinas | |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | |
| 4 | Kepala Sub Bagian Keuangan | | Kepala Sub Bagian Kepegawaian |
| 5 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. |
| 6 | Kepala Bidang Program dan Informasi | | Kepala Bidang Program dan Informasi |
| 7 | Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan | | Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan |
| 8 | Kepala Seksi Pelaporan dan Evaluasi | | Kepala Seksi Pelaporan dan Evaluasi |
| 9 | Kepala Seksi Sistem Informasi Manajemen | | Kepala Seksi Sistem Informasi Manajemen. |
| 10 | Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal | | Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal |
| 11 | Kepala Seksi Analisa Potensi | | Kepala Seksi Potensi Penanaman Modal |
| 12 | Kepala Seksi Deregulasi | | Kepala Seksi Deregulasi Penanaman Modal |
| 13 | Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah | | Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah. |

| 14 | Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal | Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal |
|----|---|---|
| 15 | Kepala Seksi Promosi | Kepala Seksi Promosi |
| 16 | Kepala Seksi Analisa Dampak Promosi | Kepala Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal |
| 17 | Kepala Seksi Pengembangan Kerjasama | Kepala Seksi Pengembangan Kerjasama. |
| 18 | Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal |
| 19 | Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan | Kepala Seksi Pemantauan |
| 20 | Kepala Seksi Pembinaan | Kepala Seksi Pembinaan |
| 21 | Kepala Seksi Analisa Dampak Penanaman Modal | Kepala Seksi Pengawasan. |
| 22 | Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan | Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan |
| 23 | Kepala Seksi Verifikasi Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan | Kepala Seksi Verifikasi Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan |
| 24 | Kepala Seksi Penerbitan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan | Kepala Seksi Penerbitan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan |
| 25 | Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan | Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan. |

| 26 | Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi | Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi | |
|----|---|---|--|
| 27 | Kepala Seksi Verifikasi Perizinan Ekonomi | Kepala Seksi Verifikasi Perizinan Ekonomi | |
| 28 | Kepala Seksi Penerbitan Perizinan Ekonomi | Kepala Seksi Penerbitan Perizinan Ekonomi | |
| 29 | Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Ekonomi | Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Ekonomi. | |
| 30 | Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan | Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan | |
| 31 | Kepala Seksi Verifikasi Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan | Kepala Seksi Verifikasi Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan | |
| 32 | Kepala Seksi Penerbitan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan | Kepala Seksi Penerbitan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan | |
| 33 | Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan | Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan. | |
| 34 | Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan | Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan | |
| 35 | Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan | Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan | |
| 36 | Kepala Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan | Kepala Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan | |
| 37 | Kepala Seksi Peningkatan dan Pelaporan Layanan | Kepala Seksi Peningkatan dan Pelaporan Layanan. | |

| DIN | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | | | |
|-----|--|--|---|--|
| 1 | Kepala Dinas | Kepala Dinas | | |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris | | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | | |
| 4 | Kepala Sub Bagian Keuangan | Kepala Sub Bagian Keuangan | | |
| 5 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. | |
| 6 | Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri | Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri | | |
| 7 | Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam | | Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam | |
| 8 | Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi | | Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi | |
| 9 | Kepala Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian | | Kepala Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian. | |
| 10 | Kepala Bidang Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri | Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri | | |
| 11 | Kepala Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah | | Kepala Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah | |
| 12 | Kepala Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standarisasi Industri | | Kepala Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standarisasi Industri | |
| 13 | Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri | | Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri. | |

| 14 | Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | | |
|----|---|---|---|--|
| 15 | Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja | | Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja | |
| 16 | Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan | | Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja | |
| 17 | Kepala Seksi Pengembangan Sektor Informal dan Usaha Mandiri | | Kepala Seksi Pengembangan Sektor Informal dan Usaha Mandiri. | |
| 18 | Kepala Bidang Pelatihan dan Sertifikasi | Kepala Bidang Pelatihan dan Sertifikasi | | |
| 19 | Kepala Seksi Produktifitas Tenaga Kerja dan Pemagangan | | Kepala Seksi Produktifitas Tenaga Kerja dan Pemagangan | |
| 20 | Kepala Seksi Kelembagaan | | Kepala Seksi Kelembagaan | |
| 21 | Kepala Seksi Standarisasi, Sertifikasi dan Kompetensi Tenaga Kerja | | Kepala Seksi Standarisasi, Sertifikasi dan Kompetensi Tenaga Kerja. | |
| 22 | Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja | Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja | | |
| 23 | Kepala Seksi Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja | | Kepala Seksi Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja | |
| 24 | Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan | | Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | |
| 25 | Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja | | Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. | |

| | DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN | | | | |
|----|--|---|--|--|--|
| | RDAGANGAN | | | | |
| 1 | Kepala Dinas | Kepala Dinas | | | |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris | | | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | | | |
| 4 | Kepala Sub Bagian Keuangan | Kepala Sub Bagian Keuangan | | | |
| 5 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. | | |
| 6 | Kepala Bidang Bina Lembaga Koperasi | Kepala Bidang Bina Lembaga Koperasi | | | |
| 7 | Kepala Seksi Penyuluhan, Pendaftaran Badan Hukum dan Data | | Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Data Koperasi | | |
| 8 | Kepala Seksi Organisasi dan Tata Laksana | | Kepala Seksi Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana | | |
| 9 | Kepala Seksi Pengawasan | | Kepala Seksi Pengawasan. | | |
| 10 | Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi | Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Koperasi | | | |
| 11 | Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dan Perizinan Simpan Pinjam | | Kepala Seksi Fasilitasi Izin Usaha dan Operasional Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi | | |
| 12 | Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi Produksi dan Konsumen | | Kepala Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Koperasi | | |
| 13 | Kepala Seksi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam | | Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi. | | |

| 14 | Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah | Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Kewirausahaan | |
|-----|--|--|---|
| 15 | Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan | | Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| 16 | Kepala Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan | | Kepala Seksi Fasilitasi dan Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| 17 | Kepala Seksi Data dan Pemasaran | | Kepala Seksi Data dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. |
| 18 | Kepala Bidang Perdagangan | Kepala Bidang Perdagangan | |
| 19 | Kepala Seksi Promosi dan Perdagangan | | Kepala Seksi Promosi dan Perdagangan |
| 20 | Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan | | Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan |
| 21 | Kepala Seksi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | | Kepala Seksi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen. |
| DIN | AS PENIDIDIKAN KEPEMUDAAN | DAN OLAH RAGA | |
| 1 | Kepala Dinas | Kepala Dinas | |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | |
| 4 | Kepala Sub Bagian Keuangan | | Kepala Sub Bagian Kepegawaian |
| 5 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan | | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan. |

| 6 | Kepala Bidang Gedung dan Sarana | Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal | | |
|----|--|--|--|--|
| 7 | Kepala Seksi Perlengkapan dan Sarana Pembelajaran Pendidikan | Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal | | |
| 8 | Kepala Seksi Gedung dan Sarana Sekolah Dasar | Kepala Seksi Pendidik, Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal | | |
| 9 | Kepala Seksi Gedung dan Sarana Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal | | Kepala Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. | |
| 10 | Kepala Bidang Pendidikan | Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar | | |
| 11 | Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal | Kepala Seksi Kelebagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar | | |
| 12 | Kepala Seksi Pendidik Dasar | Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar | | |
| 13 | Kepala Seksi Sekolah Menegah Pertama | | Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Sekolah Dasar. | |
| 14 | Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan | Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | |
| 15 | Kepala Seksi Pendidik, Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal | Kepala Seksi Kelebagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | |

| 16 | Kepala Seksi Pendidik, Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar | Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | |
|-----|---|--|--|--|
| 17 | Kepala Seksi Pendidik, Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama | | Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. | |
| 18 | Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | | |
| 19 | Kepala Seksi Kepemudaan | | Kepala Seksi Kepemudaan | |
| 20 | Kepala Seksi Olah Raga | | Kepala Seksi Olah Raga | |
| 21 | Kepala Seksi Kemitraan dan Sarana Prasarana | | Kepala Seksi Kemitraan dan Sarana Prasarana. | |
| DIN | AS PERTANIAN DAN PANGAN | | | |
| 1 | Kepala Dinas | Kepala Dinas | | |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris | | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | | |
| 4 | Kepala Sub Bagian Keuangan | | Kepala Sub Bagian Kepegawaian | |
| 5 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. | |
| 6 | Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian | Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian | | |
| 7 | Kepala Seksi Lahan dan Air | | Kepala Seksi Lahan dan Air | |
| 8 | Kepala Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian | | Kepala Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian | |

| 9 | Kepala Seksi Penyediaan Benih/Bibit, Pupuk dan Pestisida | | Kepala Seksi Penyediaan Benih/Bibit, Pupuk dan Pestisida. | |
|----|---|--|--|--|
| 10 | Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura | Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura | | |
| 11 | Kepala Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura | | Kepala Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura | |
| 12 | Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura | | Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura | |
| 13 | Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura | | Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura. | |
| 14 | Kepala Bidang Perkebunan | Kepala Bidang Perkebunan | | |
| 15 | Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan | | Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan | |
| 16 | Kepala Seksi Produksi Perkebunan dan | | Kepala Seksi Produksi Perkebunan | |
| 17 | Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan | | Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. | |
| 18 | Kepala Bidang Produksi Peternakan | Kepala Bidang Peternakan | | |
| 19 | Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan | | Kepala Seksi Produksi Peternakan | |
| 20 | Kepala Seksi Teknologi Reproduksi | | Kepala Seksi Teknologi dan Pakan Ternak | |
| 21 | Kepala Seksi Teknologi Pengembangan Pakan | | Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran. | |

| 22 | Kepala Bidang Kesehatan Hewan | Kepala Bidang Kesehatan Hewan | |
|-----|--|--|--|
| 23 | Kepala Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan | | Kepala Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan |
| 24 | Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan | | Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan |
| 25 | Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner | | Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner. |
| 26 | Kepala Bidang Pangan dan Penyuluhan | Kepala Bidang Pangan dan Penyuluhan | |
| 27 | Kepala Seksi Ketahanan Pangan | | Kepala Seksi Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan |
| 28 | Kepala Seksi Kelembagaan Petani dan Penyuluhan | | Kepala Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan |
| 29 | Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Pertanian | | Kepala Seksi Kelembagaan Petani, Penyuluh dan Sumber Daya Manusia Pertanian. |
| DIN | AS KOMUNIKASI DAN INFORMA | TIKA | |
| 1 | Kepala Dinas | Kepala Dinas | |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | |
| 4 | Kepala Sub Bagian Keuangan | | Kepala Sub Bagian Kepegawaian |
| 5 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. |
| 6 | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik | |

| 7 | Kepala Seksi Layanan Informasi Publik | | Kepala Seksi Layanan Informasi Publik |
|----|---|---|---|
| 8 | Kepala Seksi Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Publik | | Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Publik |
| 9 | Kepala Seksi Media Publik | | Kepala Seksi Media Publik. |
| 10 | Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik | Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik | |
| 11 | Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik | | Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik |
| 12 | Kepala Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Masyarakat | | Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik |
| 13 | Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik | | Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik. |
| 14 | Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | |
| 15 | Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi | | Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi |
| 16 | Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi | | Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi |
| 17 | Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi | | Kepala Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi. |
| 18 | Kepala Bidang Layanan eGovernment | Kepala Bidang Layanan eGovernment | |
| 19 | Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi | | Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi |

| 20 | Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem e Government | | Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem e Government |
|----|--|---|---|
| 21 | Kepala Seksi Tata Kelola e Government | | Kepala Seksi Tata Kelola e Government. |
| 22 | Kepala Bidang Persandian dan Statistik | Kepala Bidang Persandian dan Statistik | |
| 23 | Kepala Seksi Tata Kelola Persandian | | Kepala Seksi Tata Kelola Persandian |
| 24 | Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian | | Kepala Seksi Keamanan Komunikasi dan Informatika |
| 25 | Kepala Seksi Statistik | Kepala Seksi Statistik. | |
| | AS PENGENDALIAN PENDUDUK | | PEMBERDAYAAN |
| | REMPUANDAN PERLINDUNGANA | | |
| 1 | Kepala Dinas | Kepala Dinas | |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | |
| 4 | Kepala Sub Bagian Keuangan | | Kepala Sub Bagian Kepegawaian |
| 5 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. |
| 6 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan | |
| 7 | Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan | | Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan |

| 8 | Kepala Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana | | Kepala Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana | |
|----|---|---|---|--|
| 9 | Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga | | Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga. | |
| 10 | Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | |
| 11 | Kepala Seksi Jaminan BerKB dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi | | Kepala Seksi Jaminan BerKB dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi | |
| 12 | Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan BerKB dan | | Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan BerKB | |
| 13 | Kepala Seksi Ketahanan Keluarga | | Kepala Seksi Ketahanan Keluarga. | |
| 14 | Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Keluarga | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender | | |
| 15 | Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | | Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan | |
| 16 | Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga | | Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan | |
| 17 | Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga | | Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender | |

| 18 | Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak | Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga | |
|-----|---|--|--|
| 19 | Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Perempuan | | Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak |
| 20 | Kepala Seksi Data Gender, Anak dan Keluarga | | Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak |
| 21 | Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak | | Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga |
| DIN | AS KEARSIPAN DAN PERPUSTA | KAAN | |
| 1 | Kepala Dinas | Kepala Dinas | |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | |
| 4 | Kepala Sub Bagian Keuangan | | Kepala Sub Bagian Kepegawaian |
| 5 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. |
| 6 | Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan | Kepala Bidang Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Kearsipan | |
| 7 | Kepala Seksi Pembinaan Perangkat Daerah | | Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan. |
| 8 | Kepala Seksi Pembinaan Perusahaan, Organisasi Masyarakat/Organisasi Politik dan Masyarakat | | Kepala Seksi Pengelolaan Kearsipan |
| 9 | Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan | | Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan. |

| 10 | Kepala Bidang Pengelolaan Arsip | Kepala Bidang Preservasi dan Layanan Arsip | | |
|----|--|---|---|--|
| 11 | Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis | | Kepala Seksi Preservasi Arsip | |
| 12 | Kepala Seksi Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip | | Kepala Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip | |
| 13 | Kepala Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip Statis | | Kepala Seksi Sistem Informasi Kearsipan. | |
| 14 | Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan | Kepala Bidang Pelestarian Bahan Perpustakaan | | |
| 15 | Kepala Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan | | Kepala Seksi Pelestarian Naskah Kuno | |
| 16 | Kepala Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan | | Kepala Seksi Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | |
| 17 | Kepala Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan | | Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Bahan Pustaka. | |
| 18 | Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca | Kepala Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Layanan Perpustakaan | | |
| 19 | Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan | | Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan | |
| 20 | Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan | | Kepala Seksi Layanan Perpustakaan | |

| 21 | Kepala Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca | | Kepala Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca. |
|-----|--|--|---|
| SAT | TUAN POLISI PAMONG PRAJA | | |
| 1 | Kepala Satuan | Kepala Satuan | |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | |
| 4 | Kepala Sub Bagian Keuangan | Kepala Sub Bagian Keuangan dan | |
| 5 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | |
| 6 | Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat | Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat | |
| 7 | Kepala Seksi Kewaspadaan Dini | Kepala Seksi Kewaspadaan Dini | |
| 8 | Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan | Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan | |
| 9 | Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat | | Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat. |
| 10 | Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | |
| 11 | Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian | Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian | |
| 12 | Kepala Seksi Ketertiban Umum | Kepala Seksi Ketertiban Umum | |
| 13 | Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur | | Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur. |
| 14 | Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | |

| 15 | Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan | Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan | | |
|-----|--|---|---|--|
| 16 | Kepala Seksi Penindakan | Kepala Seksi Penindakan | | |
| 17 | Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga | | Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga. | |
| 18 | Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat | Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat | | |
| 19 | Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat | Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat | | |
| 20 | Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi | | Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi | |
| 21 | Kepala Seksi Data, Informasi dan Pengaduan | Kepala Seksi Data, Informasi dan Pengaduan. | | |
| DIN | AS KESEHATAN | | | |
| 1 | Kepala Dinas | Kepala Dinas | | |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris | | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Program Informasi dan Humas | | Kepala Sub Bagian Program Informasi dan Humas | |
| 4 | Kepala Sub Bagian Keuangan dan pengelolaan Aset | Kepala Sub Bagian Keuangan dan pengelolaan Aset | | |
| 5 | Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum | Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum. | | |
| 6 | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat | | |
| 7 | Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat | | Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat | |

| 8 | Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat | | Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat | |
|----|---|--|---|--|
| 9 | Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga | | Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga. | |
| 10 | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | | |
| 11 | Kepala Seksi Survelans dan Imunisasi | | Kepala Seksi Survelans dan Imunisasi | |
| 12 | Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular | | Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular | |
| 13 | Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa | | Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa. | |
| 14 | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan | | |
| 15 | Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer | | Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer | |
| 16 | Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional | | Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional | |
| 17 | Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan | | Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan. | |
| 18 | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan | | |
| 19 | Kepala Seksi Kefarmasian | | Kepala Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga | |
| 20 | Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana | | Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana | |

| 21 | Kepala Seksi Sumber Daya Manusia dan Kesehatan | | Kepala Seksi Sumber Daya Manusia dan Kesehatan. | |
|-----|--|--|---|--|
| DIN | AS SOSIAL | | | |
| 1 | Kepala Dinas | Kepala Dinas | | |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris | | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian | | |
| 4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. | |
| 5 | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | | |
| 6 | Kepala Seksi Perlindungan Sosial | | Kepala Seksi Data Kesejahteraan Sosial dan Fakir Miskin | |
| 7 | Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Sosial | | Kepala Seksi Perlindungan Sosial | |
| 8 | Kepala Seksi Perlindungan Lansia | | Kepala Seksi Jaminan Sosial. | |
| 9 | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial | | |
| 10 | Kepala Seksi Pemberdayaan Anak, Keluarga dan Fakir Miskin | | Kepala Seksi Pelayanan Sosial, Anak dan Lanjut Usia | |
| 11 | Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial, Partisipasi Sosial dan Organisasi Sosial dan | | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas | |
| 12 | Kepala Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial | | Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial. | |
| 13 | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial | | |

| 14 | Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas | | Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Daya Sosial |
|-----|---|--|--|
| 15 | Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial | | Kepala Seksi Pemberdayaan Anak dan Potensi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga |
| 16 | Kepala Seksi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni | | Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial. |
| DIN | AS PEKERJAAN UMUM DAN PEI | NATAAN RUANG | |
| 1 | Kepala Dinas | Kepala Dinas | |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | |
| 4 | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. | |
| 5 | Kepala Bidang Sumber Daya Air | Kepala Bidang Sumber Daya Air | |
| 6 | Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air | | Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air |
| 7 | Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air dan | | Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air |
| 8 | Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | | Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air. |
| 9 | Kepala Bidang Bina Marga | Kepala Bidang Bina Marga | |
| 10 | Kepala Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi | | Kepala Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi |

| 11 | Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dan | | Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan | |
|-----|--|--|---|--|
| 12 | Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan | | Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan. | |
| 13 | Kepala Bidang Cipta Karya | Kepala Bidang Cipta Karya | | |
| 14 | Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian | | Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian | |
| 15 | Kepala Seksi Tata Bangunan | | Kepala Seksi Tata Bangunan | |
| 16 | Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih | | Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih. | |
| 17 | Kepala Bidang Tata Ruang | Kepala Bidang Tata Ruang | | |
| 18 | Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang | | Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang | |
| 19 | Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang dan | | Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang | |
| 20 | Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang | | Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang. | |
| 21 | Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Pengujian dan Peralatan | Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Pengujian dan Peralatan | | |
| 22 | Kepala Seksi Jasa Konstruksi | | Kepala Seksi Jasa Konstruksi | |
| 23 | Kepala Seksi Laboratorium Pengujian Material Konstruksi | | Kepala Seksi Laboratorium Pengujian Material Konstruksi | |
| 24 | Kepala Seksi Tata Laksana Peralatan | | Kepala Seksi Tata Laksana Peralatan. | |
| DIN | AS KEPENDUDUKAN DAN PENC | ATATAN SIPIL | | |
| 1 | Kepala Dinas | Kepala Dinas | | |

| 2 | Sekretaris | Sekretaris | | |
|----|---|--|---|--|
| 3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | | |
| 4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. | | |
| 5 | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | |
| 6 | Kepala Seksi Identitas Penduduk | | Kepala Seksi Identitas Penduduk | |
| 7 | Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk | | Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk | |
| 8 | Kepala Seksi Pendataan Penduduk | | Kepala Seksi Pendataan Penduduk. | |
| 9 | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | | |
| 10 | Kepala Seksi Kelahiran | | Kepala Seksi Kelahiran | |
| 11 | Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian | | Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian | |
| 12 | Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian | | Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian. | |
| 13 | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | | |
| 14 | Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan | | Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan | |
| 15 | Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | | Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | |

| 16 | Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan | | Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan. |
|-----|---|--|--|
| DIN | AS PERIKANAN | | |
| 1 | Kepala Dinas | Kepala Dinas | |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian | |
| 4 | Kepala Sub Bagian Keuangan | | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. |
| 5 | Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan | Kepala Bidang Perikanan Budidaya | |
| 6 | Kepala Seksi Penyusunan Program | | Kepala Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan |
| 7 | Kepala Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan | | Kepala Seksi Pengelolaan Pembudidaya Ikan |
| 8 | Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan | | Kepala Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Pembudidaya Ikan |
| 9 | Kepala Bidang Produksi dan Sarana | Kepala Bidang Kenelayanan | |
| 10 | Kepala Seksi Perikanan Tangkap | | Kepala Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan |
| 11 | Kepala Seksi Perikanan Budidaya | | Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan |
| 12 | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan | | Kepala Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Nelayan. |
| 13 | Kepala Bidang Pemberdayaan dan Usaha Perikanan | Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan | |

| 14 | Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Daya Saing | | Kepala Seksi Pengawasan Usaha dan Bina Mutu Perikanan |
|-----|---|---|--|
| 15 | Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pesisir | | Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perikanan |
| 16 | Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya | | Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Perikanan. |
| DIN | AS PERHUBUNGAN | | |
| 1 | Kepala Dinas | Kepala Dinas | |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | |
| 4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. | |
| 5 | Kepala Bidang Lalu Lintas | Kepala Bidang Lalu Lintas | |
| 6 | Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | |
| 7 | Kepala Seksi Pembinaan Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas | Kepala Seksi Pembinaan Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas | |
| 8 | Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas | | Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas. |
| 9 | Kepala Bidang Angkutan | Kepala Bidang Angkutan | |
| 10 | Kepala Seksi Angkutan Orang | Kepala Seksi Angkutan Orang | |
| 11 | Kepala Seksi Angkutan Barang dan | Kepala Seksi Angkutan Barang | |

| 12 | Kepala Seksi Terminal dan Multi Moda | | Kepala Seksi Terminal dan Multi Moda. | |
|-----|---|---|---|--|
| 13 | Kepala Bidang Sarana dan Prasarana | Kepala Bidang Sarana dan Prasarana | | |
| 14 | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi | | |
| 15 | Kepala Seksi Pengujian Kendaraan dan | Kepala Seksi Pengujian Kendaraan | | |
| 16 | Kepala Seksi Perparkiran | | Kepala Seksi Perparkiran. | |
| DIN | AS PEMBERDAYAAN MASYARA | KAT DESA | | |
| 1 | Kepala Dinas | Kepala Dinas | | |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris | | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | | |
| 4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. | | |
| 5 | Kepala Bidang Pemerintahan Desa | Kepala Bidang Pemerintahan Desa | | |
| 6 | Kepala Seksi Penataan Desa dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa | | Kepala Seksi Penataan Desa dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa | |
| 7 | Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perkembangan Desa | | Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perkembangan Desa | |
| 8 | Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa | | Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa. | |
| 9 | Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat | Kepala Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kawasan | | |

| | | Perdesaan | | |
|-----|--|---|---|--|
| | | | | |
| 10 | Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | |
| 11 | Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna | | Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna | |
| 12 | Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Perdesaan | | Kepala Seksi Fasilitasi Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan. | |
| 13 | Kepala Bidang Pemberdayaan, Keswadayaan dan Lembaga Desa/Kemasyarakatan | Kepala Bidang Pemberdayaan, Keswadayaan dan Lembaga Desa/Kemasyarakatan | | |
| 14 | Kepala Seksi Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | | Kepala Seksi Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | |
| 15 | Kepala Seksi Keswadayaan Masyarakat, Kerjasama Antar Desa dan Lembaga Desa/Kemasyarakatan | | Kepala Seksi Keswadayaan Masyarakat dan Lembaga Desa/Kemasyarakatan | |
| 16 | Kepala Seksi Fasilitasi Pelayanan Dasar | | Kepala Seksi Fasilitasi Pelayanan Dasar. | |
| DIN | AS KEBAKARAN DAN PENYELA | MATAN | | |
| 1 | Kepala Dinas | Kepala Dinas | | |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris | | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | | |

| 4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. | | |
|-----|---|---|--|--|
| 5 | Kepala Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat | Kepala Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat | | |
| 6 | Kepala Seksi Penyuluhan | Kepala Seksi Penyuluhan | | |
| 7 | Kepala Seksi Pengembangan Lembaga dan Kelompok Masyarakat | | Kepala Seksi Pengembangan Lembaga dan Kelompok Masyarakat | |
| 8 | Kepala Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran | Kepala Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran. | | |
| 9 | Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | | |
| 10 | Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran | Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran | | |
| 11 | Kepala Seksi Penyelamatan | Kepala Seksi Penyelamatan | | |
| 12 | Kepala Seksi Investigasi, komunikasi dan Laboratorium | | Kepala Seksi Investigasi, komunikasi dan Laboratorium. | |
| 13 | Kepala Bidang Sarana dan Prasarana | Kepala Bidang Penunjang dan Pengendalian Pemadam Kebakaran | | |
| 14 | Kepala Seksi Analisa Kebutuhan | Kepala Seksi Analisa dan Pengadaan Kebutuhan Sarana Prasarana | | |
| 15 | Kepala Seksi Distribusi | | Kepala Seksi Distribusi | |
| 16 | Kepala Seksi Pemeliharaan | Kepala Seksi Pengendalian Sarana Prasarana. | | |
| DIN | AS PERUMAHAN RAKYAT DAN I | KAWASAN PERMUKIMAN | | |
| 1 | Kepala Dinas | Kepala Dinas | | |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris | | |

| 3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | | |
|----|---|--|--|--|
| 4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. | | |
| 5 | Kepala Bidang Perumahan Rakyat | Kepala Bidang Perumahan Rakyat | | |
| 6 | Kepala Seksi Pengembangan Perumahan | | Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Perumahan | |
| 7 | Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan | | Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan | |
| 8 | Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana, Sarana Utilitas | | Kepala Seksi Pembinaan dan Perizinan Perumahan. | |
| 9 | Kepala Bidang Kawasan Permukiman | Kepala Bidang Kawasan Permukiman | | |
| 10 | Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman | | Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | |
| 11 | Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman | | Kepala Seksi Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh | |
| 12 | Kepala Seksi Peningkatan Prasarana dan Utilitas Kawasan | | Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman. | |
| 13 | Kepala Bidang Pengawasan dan Verifikasi | Kepala Bidang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Ultilitas | | |
| 14 | Kepala Seksi Verifikasi Prasarana, Sarana Utilitas | | Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana, Sarana Utilitas | |

| 15 | Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman | | Kepala Seksi Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana Utilitas |
|-----|---|---|--|
| 16 | Kepala Seksi Pelaporan | | Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian. |
| BAI | DAN PERENCANAAN PEMBANGI | JNAN DAERAH | |
| 1 | Kepala Badan | Kepala Badan | |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | |
| 4 | Kepala Sub Bagian Keuangan | Kepala Sub Bagian Keuangan | |
| 5 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan |
| 6 | Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | |
| 7 | Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat | | Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan |
| 8 | Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kepemudaan | | Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan |
| 9 | Kepala Sub Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan | | Kepala Sub Bidang Data dan Informasi |
| 10 | Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | |
| 11 | Kepala Sub Bidang Ekonomi | | Kepala Sub Bidang Pemerintahan |

| 12 | Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha | | Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia |
|-----|---|--|--|
| 13 | Kepala Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam | | Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial |
| 14 | Kepala Bidang Sosial dan Budaya | Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | |
| 15 | Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemberdayaan Desa | | Kepala Sub Bidang Perekonomian |
| 16 | Kepala Sub Bidang Ketenteraman dan Ketertiban | | Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam |
| 17 | Kepala Sub Bidang Pengembangan Adat dan Budaya | | Kepala Sub Bidang Keuangan dan Investasi |
| 18 | Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah | Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayanan | |
| 19 | Kepala Sub Bidang Infrastruktur Wilayah | | Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum |
| 20 | Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah | | Kepala Sub Bidang Kewilayahan |
| 21 | Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | | Kepala Sub Bidang Permukimandan Perhubungan |
| BAI | DAN PENDAPATAN DAERAH | | |
| 1 | Kepala Badan | Kepala Badan | |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Keuangan | Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian | |
| 4 | Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan | | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. |
| 5 | Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi | Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi | |

| 6 | Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan | Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan | |
|-----|---|--|------------------------------|
| 7 | Kepala Sub Bidang Pemutakhiran Data dan Teknologi Informasi | Kepala Sub Bidang Pemutakhiran Data dan Teknologi Informasi | |
| 8 | Kepala Bidang Penetapan | Kepala Bidang Penetapan | |
| 9 | Kepala Sub Bidang Pemeriksaan | Kepala Sub Bidang Pemeriksaan | |
| 10 | Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan | Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan | |
| 11 | Kepala Bidang Penagihan dan Pasedahan | Kepala Bidang Penagihan dan Pasedahan | |
| 12 | Kepala Sub Bidang Penagihan | Kepala Sub Bidang Penagihan | |
| 13 | Kepala Sub Bidang Pasedahan | Kepala Sub Bidang Pasedahan | |
| BAI | DAN KEPEGAWAIAN DAN PENG | EMBANGAN SUMBER DAYA | A MANUSIA |
| 1 | Kepala Badan | Kepala Badan | |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | |
| 4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. | |
| 5 | Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Aparatur | Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur | |
| 6 | Kepala Sub Bidang Mutasi | | Kepala Sub Bidang Mutasi |
| 7 | Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi | | Kepala Sub Bidang Promosi |

| 8 | Kepala Sub Bidang Data dan Informasi | | Kepala Sub Bidang Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur. |
|-----|---|--|---|
| 9 | Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia | Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| 10 | Kepala Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi | | Kepala Sub Bidang Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional |
| 11 | Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional | | Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis |
| 12 | Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi | | Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara. |
| 13 | Kepala Bidang Pengadaan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur | Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara | |
| 14 | Kepala Sub Bidang Pengadaan Aparatur | | Kepala Sub Bidang Pengadaan Dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara |
| 15 | Kepala Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | Kepala Sub Bidang Data Dan Informasi Kepegawaian |
| 16 | Kepala Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan | | Kepala Sub Bidang Fasilitasi Lembaga Profesi Aparatur Sipil Negara. |
| BAI | DAN PENGELOLAAN KEUANGAN | I DAN ASET DAERAH | |
| 1 | Kepala Badan | Kepala Badan | |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian | |

| 4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. |
|-----|---|---|---|
| 5 | Kepala Bidang Pengelola Keuangan Daerah | Kepala Bidang Pengelola Keuangan Daerah | |
| 6 | Kepala Sub Bidang Analisis, Perencanaan, Pengendalian Anggaran dan Perbendaharaan | Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran | |
| 7 | Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Pembukuan | Kepala Sub Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan | |
| 8 | Kepala Bidang Pengelola Aset Daerah | Kepala Bidang Pengelola Aset Daerah | |
| 9 | Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan | Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan | |
| 10 | Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset | Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset | |
| BAI | DAN RISET DAN INOVASI DAERA | \H | |
| 1 | Kepala Dinas | Kepala Dinas | |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian | |
| 4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. | | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. |
| 5 | Kepala Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan | | Kepala Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan |
| 6 | Kepala Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | Kepala Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| 7 | Kepala Sub Bidang Ekonomi | | Kepala Sub Bidang Ekonomi | |
|-----|---|--|--|--|
| 8 | Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | |
| 9 | Kepala Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi | | Kepala Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi | |
| 10 | Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | | Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | |
| 11 | Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana | | Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana | |
| 12 | Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi | | Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi | |
| BAI | OAN PENANGGULANGAN BENCA | ANA DAERAH | | |
| 1 | Kepala Pelaksana | Kepala Pelaksana | | |
| 2 | Sekretaris unsur pelaksana. | Sekretaris unsur pelaksana. | | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Perencanaan | | Kepala Sub Bagian Perencanaan | |
| 4 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | | |
| 5 | Kepala Sub Bagian Keuangan. | | Kepala Sub Bagian Keuangan. | |
| 6 | Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | | |
| 7 | Kepala Seksi Pencegahan | | Kepala Seksi Pencegahan | |
| 8 | Kepala Seksi Kesiapsiagaan. | | Kepala Seksi Kesiapsiagaan. | |
| 9 | Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik | Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik | | |

| 10 | Kepala Seksi Kedaruratan | | Kepala Seksi Kedaruratan | |
|-----|--|--|--|--|
| 11 | Kepala Seksi Logistik. | | Kepala Seksi Logistik. | |
| 12 | Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi | | |
| 13 | Kepala Seksi Rehabilitasi | | Kepala Seksi Rehabilitasi | |
| 14 | Kepala Seksi Rekonstruksi. | | Kepala Seksi Rekonstruksi. | |
| BAI | DAN KESATUAN BANGSA DAN F | POLITIK | | |
| 1 | Kepala Dinas | Kepala Dinas | | |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris | | |
| 3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | | |
| 4 | Kepala Sub Bagian Keuangan | | Kepala Sub Bagian Kepegawaian | |
| 5 | Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran | | Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran | |
| 6 | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa | | |
| 7 | Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | | Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | |
| 8 | Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa | | Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa | |
| 9 | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri | | |
| 10 | Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik Dan Peningkatan Demokrasi | | Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik Dan Peningkatan Demokrasi | |

| 11 | Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik | | Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik |
|-----|---|---|--|
| 12 | Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan | Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan | |
| 13 | Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Agama | | Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Agama |
| 14 | Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan | | Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan |
| 15 | Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik | Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik | |
| 16 | Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini Dan Intelijen | | Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini Dan Intelijen |
| 17 | Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik | | Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik |
| RUI | MAH SAKIT DAERAH MANGUSAI | DA . | |
| 1 | DIREKTUR | DIREKTUR | |
| 2 | Wakil Direktur Pelayanan | Wakil Direktur Pelayanan | |
| 3 | Kepala Bidang Pelayanan Medik | Kepala Bidang Pelayanan Medik | |
| 4 | Kepala Seksi Pelayanan Medik | | Kepala Seksi Pelayanan Medik |
| 5 | Kepala Seksi Rekam Medik dan Medikolegal. | | Kepala Seksi Rekam Medik dan Medikolegal. |
| 6 | Kepala Bidang Pengembangan Pelayanan | Kepala Bidang Pengembangan Pelayanan | |

| 7 | Kepala Seksi Pelayanan Sub Spesialis | | Kepala Seksi Pelayanan Sub Spesialis | |
|----|---|--|--|--|
| 8 | Kepala Seksi Medical Tourism. | | Kepala Seksi Medical Tourism. | |
| 9 | Kepala Bidang Keperawatan | Kepala Bidang Keperawatan | | |
| 10 | Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan. | | Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan. | |
| 11 | Kepala Seksi Pelayanan Kebidanan. | | Kepala Seksi Pelayanan Kebidanan. | |
| 12 | Wakil Direktur Penunjang dan Sumber Daya Manusia | Wakil Direktur Penunjang dan Sumber Daya Manusia | | |
| 13 | Kepala Bidang Sumber Daya Manusia | Kepala Bidang Sumber Daya Manusia | | |
| 14 | Kepala Seksi Perencanaan dan Administrasi Sumber Daya Manusia | | Kepala Seksi Perencanaan dan Administrasi Sumber Daya Manusia | |
| 15 | Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia | | Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia | |
| 16 | Kepala Bidang Penunjang | Kepala Bidang Penunjang | | |
| 17 | Kepala Seksi Penunjang Medik | | Kepala Seksi Penunjang Medik | |
| 18 | Kepala Seksi Penunjang Non Medik | | Kepala Seksi Penunjang Non Medik | |
| 19 | Kepala Bidang Diklat dan Mutu | Kepala Bidang Diklat dan Mutu | | |
| 20 | Kepala Seksi Diklat dan Litbang Nakes | | Kepala Seksi Diklat dan Litbang Nakes | |
| 21 | Kepala Seksi Penjaminan Mutu dan Sistem Informasi Manajemen. | | Kepala Seksi Penjaminan Mutu dan Sistem Informasi Manajemen. | |

| 22 | Wakil Direktur Umum dan Keuangan | Wakil Direktur Umum dan Keuangan | | |
|----|--|---|---|--|
| 23 | Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi | Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi | | |
| 24 | Kepala Sub Bagian Anggaran dan Keuangan | | Kepala Sub Bagian Anggaran dan Keuangan | |
| 25 | Kepala Sub Bagian Penerimaan | | Kepala Sub Bagian Penerimaan | |
| 26 | Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi. | | Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi. | |
| 27 | Kepala Bagian Umum dan Pemasaran | Kepala Bagian Umum dan Pemasaran | | |
| 28 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | |
| 29 | Kepala Sub Bagian Aset dan Rumah Tanga | | Kepala Sub Bagian Aset dan Rumah Tanga | |
| 30 | Kepala Sub Bagian Humas dan Pemasaran. | | Kepala Sub Bagian Humas dan Pemasaran. | |
| 31 | Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum | Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum | | |
| 32 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program | | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program | |
| 33 | Kepala Sub Bagian Hukum dan Kerjasama | | Kepala Sub Bagian Hukum dan Kerjasama | |
| 34 | Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan | | Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan | |
| | Jumlah | 276 | 377 | |

3. Penyesuaian Sistem Kerja

Penyesuaian mekanisme kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan public kepada masyarakat. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang SIstem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, bahwa system kerja digunakan sebagai instrument bagi pegawai aparatur sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi. Pemerintah KAbupaten BAdung telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang dapat dijadikan acuan bagi semua Perangkat Daerah yang terdampak penyederhanaan birokrasi.

IV. DAMPAK PENYEDERHANAAN

1. Dampak Positif

- o Rantai birokrasi lebih singkat → pengambilan keputusan lebih cepat.
- o Peningkatan profesionalisme ASN melalui jabatan fungsional.
- o Efisiensi anggaran belanja pegawai struktural.
- o Organisasi lebih fokus pada kinerja dan hasil (output dan outcome).

2. Tantangan yang Dihadapi

- o Adaptasi pegawai terhadap perubahan sistem jabatan dan pola kerja.
- o Kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan.
- o Penyesuaian budaya kerja dari orientasi struktural ke orientasi fungsional.
- o Penataan sistem evaluasi kinerja yang lebih akurat.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan:

Penyederhanaan struktur organisasi di Kabupaten Badung telah berhasil mewujudkan organisasi perangkat daerah yang lebih ramping, lincah, dan adaptif. Jumlah jabatan struktural berkurang signifikan, sementara peran jabatan fungsional diperkuat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pencapaian tujuan reformasi birokrasi.

Rekomendasi:

- 1. Pemerintah Kabupaten Badung perlu memperkuat program pelatihan dan sertifikasi jabatan fungsional.
- 2. Sistem tunjangan dan insentif bagi pejabat fungsional harus terus dioptimalkan agar seimbang dengan beban kerja.
- 3. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan yang terdampak penyederhanaan birokrasu, minimal setiap 2 tahun sekali.
- 4. Penguatan budaya kerja berbasis kinerja melalui sistem monitoring dan evaluasi yang terukur.

52

5. Kolaborasi lintas perangkat daerah harus ditingkatkan untuk mengantisipasi potensi

tumpang tindih tugas.